

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mengingat kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakat semakin beragam di Kabupaten Pasaman Barat seperti kesenjangan sosial, sarana dan prasarana publik, faktor ekonomi, dan pendidikan, dll. Hal tersebut seharusnya mendorong pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Masa reses memiliki peran dimana anggota DPRD dituntut sebagai komunikator dalam penyampaian aspirasi rakyat, misalnya dalam pembentukan opini public dalam membuat suatu gagasan yang awalnya ditolak kemudian dipertimbangkan dan dapat diterima. Sistem pemerintahan tidak hanya berperan sebagai pembuat perundang-undangan, penganggaran, ataupun pengawasan. Namun juga berusaha sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah baik untuk menyampaikan informasi, pendidikan, sosialisasi, motivasi, ataupun sebagai tempat diskusi.

Berdasarkan temuan peneliti jika dilihat dari aspek *stand for* menjelaskan bahwa selama pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat sudah berusaha untuk memberikan variasi dalam pelaksanaan reses yang dilakukannya, misalnya pelaksanaan reses di pantai untuk masyarakat bermatapencaharian nelayan, di kebun

atau sawah untuk masyarakat bermatapencaharian petani, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diselipkan jaring aspirasi dan sebagainya.

Pelaksanaan reses menemukan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi namun belum diimbangi dengan antusisme masyarakat dalam penyampaian aspirasi selama kegiatan reses berlangsung. Meskipun begitu, antusiasme masyarakat didapat dari kegiatan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang menggunakan pendekatan informal dan alami dengan cara duduk-duduk diwarung ataupun menghadiri kegaitan-kegiatan kemasyarakatan.

Dari temuan penelitian, peneliti menganalisis bahwa kualitas komunikasi yang terjalin antara anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan konstituen dan masyarakatnya belum berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan selama pelaksanaan reses berlangsung banyak diantara masyarakat atau peserta reses belum dapat menyampaikan suara atau aspirasinya selama kegiatan reses dilaksanakan. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat reses juga sebagai sarana dan wadah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Selain itu mengingat tidak meratanya pendidikan formal masyarakat juga seharusnya menjadi tolak ukur bagi DPRD Kabupaten Pasaman Barat lebih gencar dalam hal pemberian bekal pengetahuan politik untuk masyarakat.

Namun jika dilihat dari aspek *act for*, pada tahapan pelaporan reses anggota DPRD Kabupten Pasaman Barat akan berusaha untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang didapatnya selama pelaksanaan reses untuk menjadi prioritas realisasi kebijakan pembangunan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Namun, dalam proses persebaran

publikasi hasil reses belum dilakukan secara maksimal oleh DPRD Kabupaten Pasaman, terbukti dengan minimnya pemberitaan mengenai hasil rapat DPRD Kabupaten Pasaman Barat yang membahas reses.

Selain itu, hal yang membuat kegiatan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak efektif yaitu tidak meratanya informasi mengenai pelaksanaan reses tersebut. Meskipun antusiasme masyarakat selama pelaksanaan reses ada namun hanya dirasakan sebagian masyarakat namun sebagian masyarakatnya lagi merasa tidak mendapatkan informasi apa-apa. Hal ini tentu juga menjadi masalah yang patut diperhatikan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Serta jadwal pelaksanaan reses yang dirasakan oleh sebagian masyarakat kurang pas mengingat kehidupan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang masih bergantung pada mata pencaharian pertanian, yang terkadang menghambat kehadiran masyarakat di kegiatan reses yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Dari Kendal-kendala yang peneliti jabarkan di atas seharusnya DPRD Kabupaten Pasaman Barat segera berbenah demi tercapainya tujuan dan maksud kegiatan reses dilaksanakan. Mengingat respon masyarakat yang positif terhadap pelaksanaan reses tersebut, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat sehendaknya lebih memaksimalkan kegiatan reses tersebut. Karena lewat pelaksanaan reses inilah masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan masukan dan pandangan untuk kedepannya yaitu:

1. Pada peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam bagaimana proses sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
2. Melakukan pendalaman terhadap bagaimana pelaksanaan reses yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasaman Barat.
3. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut mengenai pelaksanaan reses untuk mempermudah penelitian.
4. Harapan untuk pemerintah khususnya DPRD Kabupaten Pasaman Barat agar lebih giat dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan politik untuk masyarakat.
5. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik membahas pelaksanaan reses khususnya pelaksanaan reses di Kabupaten Pasaman Barat.

